

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada tahun 2025, Kabupaten Muara Enim menjadi acuan dalam perhitungan inflasi di Provinsi Sumatera Selatan. Terdapat 4 daerah yang menjadi acuan dalam perhitungan inflasi, yaitu Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten OKI.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Muara Enim Bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Pada Oktober 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Muara Enim sebesar 3,81 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,
 - Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,86 persen; kelompok transportasi sebesar 0,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga. Dan budaya sebesar 0,59 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyedia makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 19,13 persen.
 - Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Muara Enim bulan Oktober 2025 masing-masing sebesar 0,13 persen dan 1,89 persen.
 - Indeks Harga Konsumen / Inflasi Menurut Kelompok

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Oktober 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Muara Enim, pada Oktober 2025 terjadi inflasi y-on-y 3,81 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,06 pada Oktober 2024 menjadi 111,14 pada Oktober 2025. Tingkat inflasi m-to-m dan y-to-d masing-masing sebesar 0,13 persen dan 1,89 persen

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 5,47 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,41 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,86 persen; kelompok transportasi sebesar 0,03 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,59 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 19,13 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi y-on-y masing-masing sebesar 0,11 persen dan 0,32 persen. Sementara kelompok komoditas pakaian dan alas kaki tidak mengalami perubahan.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Oktober 2025, antara lain: beras, mie kering instant, daging ayam ras, minyak goreng, semangka, terong, tomat, cabai merah, wortel, bawang merah, garam, kopi bubuk, pasir, bahan bakar rumah tangga, ban luar mobil, pelumas/oli mesin, mainan anak, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: ikan patin, kangkung, cabai rawit, kacang panjang, bawang putih, gula pasir, susu bubuk untuk balita,

keramik, sepeda motor, dan pasta gigi.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m pada Oktober 2025, antara lain: daging ayam ras, ikan sarden segar, telur ayam ras, jeruk, semangka, kangkung, wortel, bawang putih, gula pasir, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m, antara lain: ikan nila, sawi hijau, sawi putih/pecay/pitsai, terong, tomat, cabai merah, cabai rawit, kacang panjang, bawang merah, dan kopi bubuk.

Pada Oktober 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,20 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,04 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,55 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y masing-masing sebesar 0,01 persen dan 0,02 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki; dan kelompok transportasi tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi y-on-y di Kabupaten Muara Enim.

1. Pada November 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Muara Enim sebesar 2,62 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 111,27.
 - Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,55 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,24 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,84 persen; kelompok transportasi sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,59 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 18,91 persen.

Tingkat deflasi month to month (m-to-m) dan tingkat year to date (y-to-d) Kabupaten Muara Enim bulan November 2025 masing-masing sebesar 0,12 persen dan 2,01 persen.

- Indeks Harga Konsumen / Inflasi Menurut Kelompok

Perkembangan harga berbagai komoditas pada November 2025 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Muara Enim, pada November 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,62 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,43 pada November 2024 menjadi 111,27 pada November 2025. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,212 persen dan 2,62 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,55 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,24 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,84 persen; kelompok transportasi sebesar 0,05 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,59 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 18,91 persen. Kelompok

komoditas perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi y-on-y masing-masing sebesar 0,21 persen dan 0,34 persen. Sementara kelompok komoditas pakaian dan alas kaki tidak mengalami perubahan.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada November 2025, antara lain: beras, mie kering instan, daging ayam ras, ikan sarden segar, telur ayam ras, minyak goreng, jeruk, semangka, kangkung, ketimun, terong, cabai merah, wortel, bawang merah, garam, kopi bubuk, pasir, dan ban luar mobil, pelumas/ oli mesin, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: ikan nila, ikan patin, tomat, bawang putih, gula pasir, susu bubuk untuk balita, sepeda motor, televisi berwarna, buku tulis bergaris dan pasta gigi.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada November 2025, antara lain: beras, jeruk, semangka, cabai merah, wortel, bawang putih, tempe, bahan bakar rumah tangga, sepeda motor, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m antara lain: daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, kol putih/kubis, sawi putih/pecay/pitsai, ketimun, tomat, cabai rawit, bawang merah, dan gula pasir.

Pada November 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,04 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,02 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,01 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,01 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,53 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y masing-masing sebesar 0,01 persen dan 0,02 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi y-on-y di Kabupaten Muara Enim.

1. Pada Desember 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Kabupaten Muara Enim sebesar 2,88 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,22.
 - Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,19 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,84 persen; kelompok transportasi sebesar 0,40 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 22,06 persen.

Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Kabupaten Muara Enim bulan Desember 2025 masing-masing sebesar 0,85 persen dan 2,88 persen.

- Indeks Harga Konsumen / Inflasi Menurut Kelompok

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Desember 2025 secara umum menunjukkan

adanya Kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Muara Enim, pada Desember 2025 terjadi inflasi y-on-y sebesar 2,88 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,08 pada Desember 2024 menjadi 112,22 pada Desember 2025. Tingkat inflasi m-to-m dan tingkat inflasi y-to-d masing-masing sebesar 0,85 persen dan 2,88 persen.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh kenaikan sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 2,25 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,19 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,00 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,42 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,16 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 22,06 persen. Kelompok komoditan perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi y-on-y masing-masing sebesar 0,16 persen dan 0,33 persen. Sementara kelompok komoditan pakaian dan alas kaki tidak mengalami perubahan.

Komoditas yang dominan memberikan andil/kontribusi inflasi y-on-y pada Desember 2025, antara lain: beras, mie kering instant, daging ayam ras, ikan sarden segar, jeruk, bayam, cabai merah, cabai rawit, wortel, bawang merah, kopi bubuk, sigaret kretek tangan (SKT), batu bata/batu tela, pasir, bahan bakar rumah tangga, ban luar mobil, bensin, pelumas/oli mesin, mainan anak, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditan yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y antara lain: ikan nila, ikan patin, kol putih/kubis, sawi, putih/pecay/pitsai, ketimun, tomat, kacang panjang, bawang putih, sepeda motor, dan televisi berwarna.

Sementara komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi m-to-m pada Desember 2025, antara lain: daging ayam ras, ikan nila, telur ayam ras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, bahan bakar rumah tangga, bensin, dan emas perhiasan. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi m-to-m antara lain: beras, ikan sarden segar, jeruk, semangka, bayam, kol putih/kubis, tomat, kentang, gula pasir, dan mainan anak.

Pada Desember 2025, kelompok pengeluaran yang memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,93 persen; kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,11 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,02 persen; kelompok transportasi sebesar 0,04 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,01 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 0,01 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 1,77 persen. Kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y masing-masing sebesar 0,01 persen dan 0,02 persen. Sedangkan kelompok pakaian dan alas kaki tidak memberikan andil/sumbangan yang signifikan terhadap inflasi y-on-y di Kabupaten Muara Enim.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengendalian Inflasi berdasarkan Strategi 4K antara lain :

K-1 Ketersediaan Pasokan :

- Perubahan cuaca yang mengganggu hasil produksi pertanian dan Hortikultura di Kabupaten Muara Enim

K-2 Keterjangkauan Harga :

- Gejolak harga pada menjelang dan pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri dan Idul Adha

K-3 Kelancaran Distribusi :

- Hasil produksi pertanian dan hortikultura tidak sepenuhnya masuk ke pasar yang berada di Wilayah Kabupaten Muara Enim tetapi di bawa ke Luar Daerah
- Belum terselenggaranya subsidi ongkos angkutan kendaraan bahan pangan di Kabupaten Muara Enim

K-4 Komunikasi Efektif :

Belum terselenggaranya secara optimal Kerjasama Antar Daerah dengan daerah penghasil bahan pangan di Kabupaten Muara Enim

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Selain mendukung pencapaian sasaran inflasi nasional, upaya pengendalian inflasi dan penciptaan stabilitas harga di daerah juga berdampak positif bagi perekonomian dan masyarakat setempat. Manfaat positif yang dapat diperoleh dengan terciptanya stabilitas harga di daerah diantaranya, yaitu :

1. Terjaganya daya beli sehingga dapat mempertahankan tingkat kesejahteraan masyarakat.
2. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi setiap pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatan usaha khususnya investasi daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

Koordinasi pengendalian inflasi merupakan elemen penting untuk keberhasilan pengendalian inflasi, karena determinan inflasi dipengaruhi oleh berbagai kebijakan baik kebijakan moneter, fiskal maupun sektoral yang melibatkan berbagai macam instansi baik di level pusat maupun daerah, serta keterikatan ekonomi antar daerah, sehingga tekanan inflasi yang terjadi di suatu daerah berpotensi merambat ke daerah lainnya.

berikut beberapa pelaksanaan kegiatan selama bulan Oktober s.d Desember Tahun 2025 dalam Rangka Pengendalian inflasi di Kabupaten Muara Enim :

1. Alokasi Anggaran untuk Penanganan Inflasi

Untuk mendukung tugas TPID, Pemerintah Kabupaten Muara Enim melalui Bagian

Perekonomian dan SDA, Dinas Perindustrian, Perdagangan Serta Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perikanan

2. Dalam upaya pengendalian inflasi di Kabupaten Muara Enim, telah ditetapkan Tim Pengendalian dan Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Muara Enim melalui Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 35/KPTS/V/2024 tanggal 3 Januari 2025 tentang Tim Pengendalian dan Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Muara Enim.

3. Pemerintah Kabupaten Muara Enim telah menetapkan kebijakan untuk mendukung pengendalian inflasi daerah melalui penetapan Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 132/KPTS/V/2022 tanggal 16 Februari 2022 tentang Peta Jalan Rencana Aksi Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2022-2024.

4. Dalam rangka menindaklanjuti Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 1.14/029/IJ tentang Pengawasan APIP atas Pengendalian Inflasi Daerah, maka Inspektorat Kabupaten Muara Enim membentuk Tim Pengawas Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2023 melalui Keputusan Inspektur Kabupaten Muara Enim Nomor 40/KPTS/Inspektorat-V/2023.

Tim Pengawas Pengendalian Inflasi Daerah setiap harinya berkordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) terkait data sebagai berikut:

1. Perkembangan harian harga komoditas terpilih.
2. Penyebab terjadinya kenaikan harga komoditas terpilih.
3. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam pengendalian inflasi
4. Hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Muara Enim dalam
5. pengendalian inflasi.
6. Stok beras dan potensi kekurangan stok beras sebagai dampak El Nino

Data tersebut dilaporkan setiap harinya kepada Kementerian Dalam Negeri melalui <http://wasinflasi.kemendagri.go.id> dan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.

5. Melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri secara online melalui aplikasi *zoom meeting* dan Rapat Koordinasi Internal TPID.

6. Melaksanakan Rapat bersama Badan Pusat Statistik dengan Tim Pengendalian Inflasi TPID Kabupaten Muara Enim

7. Melaksanakan Rapat Koordinasi Perkembangan Implementasi MBG di Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

8. Rapat Koordinasi, Capacity Building, High Level Meeting TPID & TP2DD Kabupaten Muara Enim Tahun 2025

9. Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar Murah (OPM) Bulan Oktober dan Desember Tahun 2025

10. Launching Sembako Murah

11. Gerakan Menanam

12. Panen Raya

13. Launching Program Strategis Peningkatan Produksi Pertanian dan Peternakan Program MEMBARA

14. Monitoring Ketersediaan dan Keterjangkauan Harga Barang Kebutuhan Pokok

15. Kerjasama dengan Daerah Penghasil Komoditi untuk Kelancaran Pasokan antara lain :

Kesepakatan Bersama dan Nota Kesepakatan Kabupaten Muara Enim antara lain :

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tentang Kerja Sama Antara Daerah;

Nomor : 134.4/15/PKS/DISPERINDA ESDM-02/IV/2025

Nomor : 100/38/PKS/KERJA SAMA-2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, 2025 s.d 2030

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik;

Nomor : 134.4/40/IV/2025

Nomor : 100.3.7.1/KB.BTD-2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, 2025 s.d 2030

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG tentang Pembangunan Infrastruktur Pasca Panen Perum BULOG di Kabupaten Muara Enim;

Nomor : 119/42/IV/2025

Nomor : MoU-24/DS600

Tanggal : 27 Oktober 2025

Jangka Waktu 2 (dua) Tahun, 2025 s.d 2027

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Palembang dengan Pemerintah Kabupaten Muara Enim tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik;

Nomor : 415.4/12/KB/IV/2025

Nomor : 134.4/26/IV/2025

Tanggal : 29 September 2025

Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, 2025 s.d 2030

- Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Kaur Provunsi Bengkulu dengan tentang Pengembangan Pembangunan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik;

Nomor : 134.4/30/IV/2025

Nomor : 4.15.4-19 Tahun 2025

Tanggal : 29 September 2025

Jangka Waktu 4 (empat) Tahun, 2025 s.d 2029

- Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Muara Enim tentang Penyediaa, Pemanfaatan dan Pengembangan Data dan/atau Informasi Statistis dalam rangka Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim;

Nomor : 119/027/IV/2025

Nomor : B-439/16030/HK.610/NK/09/2025

Tanggal : 12 September 2025

Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, 2025 s.d 2030

- Nota Kesepakatan antara Badan Gizi Nasional dengan Pemerintah Daerah se- Provinsi Sumatera Selatan tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Kegiatan Program Makan Bergizi.

Nomor : 23.1/NK.01/05/2025

Nomor : 010/NK/OTDA/I/2025

Nomor : 100.3.7.1/02/NK/PEMKAB OKU/2025

Nomor : 415.4/04/IV/2025

Nomor : 119/12/IV/2025

Nomor : 03/415.4/KSDD/MOU/I/2025

Nomor : 03/NK/I/2025

Nomor : T-100.3.7.1/007/NK/SETDA/2025

Nomor : 415.4/55/KSB/I/2025

Nomor : 04/MoU/II/2025

Nomor : 06/PEMKAB-OKUS/MOU/2025

Nomor : 100/06/NK/TKKSD-01/I/2025

Nomor : 100/005/KSB/I/2025

Nomor : 005/I/KESBER/SETDA-PALI/2025

Nomor : 26/MOU/I/MRU/PEM-SETDA/2025

Nomor : 415.4/04/NK/IV/2025

Nomor : 100/02/MoU/SD.1-PGA/2025

Nomor : 100.3.7/01/NK/PEMKOT.LLG/2025

Nomor : 01/KB/IV/2025

Tanggal : 15 Mei 2025

Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, 2025 s.d 2030

Perjanjian Kerjasama Kabupaten Muara Enim antara lain :

- Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat tentang Penguatan Bidang Perdagangan;

Nomor : 134.4/15/PKS/DISPERINDAG ESDM-02/IV/2025

Nomor : 100/38/PKS/KERJA SAMA- 2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

Jangka Waktu 5 (Lima) Tahun, 2025 s.d 2030

- Dinas Perindustrian, Perdagangan, serta ESDM Kabupaten Muara Enim, dengan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kabupaten Tanah Datar tentang Stabilisasi Harga dan Pendistribusian Kebutuhan Bahan Pangan;

Nomor : 134.4/15/PKS/DISPERINDAG ESDM-2 2025

Nomor : 100.3.7.1/34/PKS/TD-2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

Jangka Waktu 5(Lima) Tahun, 2025 s.d 2030

- Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Peternakan Kabupaten Muara Enim dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar tentang Pengembangan Komoditas Tanaman

Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Melalui Fasilitasi, Pendampingan, Budidaya, dan Pemasaran Komoditi Pertanian.

Nomor : 134.4/ 16/ PKS/ DTPHP/IV/2025

Nomor : 100.3.7.1/33/PKS/TD-2025

Tanggal : 22 Oktober 2025

Jangka Waktu 5 (lima) Tahun, 2025 s.d 2030

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Muara Enim pada triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pentingnya penguatan koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Muara Enim dan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi komoditas pangan di Kabupaten Muara Enim.
2. Perlunya Pelaksanaan program kegiatan yang terarah dalam upaya pengendalian inflasi secara jangka pendek, Menengah dan Panjang di Kabupaten Muara Enim

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Rekomendasi program kerja bersama sampai dengan akhir tahun di Kabupaten Muara Enim pada triwulan IV 2025 adalah sebagai berikut :

- Penguatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Manajemen Pasokan dan Produksi Lokal

Pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi pasokan dan distribusi pangan, khususnya menjelang periode musiman, melalui optimalisasi penyimpanan, *cold storage*, dan penguatan distribusi guna menekan fluktuasi harga serta ketergantungan pada pasokan luar daerah. Secara jangka menengah, peningkatan produksi pangan lokal perlu didorong melalui dukungan sarana produksi, pendampingan teknologi dan akses pembiayaan pertanian, dengan fokus pada komoditas penyumbang inflasi, sehingga pengendalian inflasi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

- Optimalisasi Program Pengendalian Inflasi (TPID)

Tim pengendalian inflasi Daerah (TPID) perlu lebih proaktif dalam melakukan pemantauan harga harian dan intervensi dini. Operasi Pasar Murah, Kerjasama Antar Daerah (KAD) dan pemanfaatan data inflasi sebagai *early warning system* harus diperkuat. Dengan respons kebijakan yang lebih cepat dan terukur, tekanan inflasi musiman dapat diredam sebelum berdampak luas ke masyarakat.

- Penguatan Perlindungan Sosial yang bersifat Adaptif Inflasi

Pemerintah Daerah disarankan menyesuaikan program bantuan sosial dengan dinamika inflasi pangan, bantuan bersifat temporer dan tepat sasaran, seperti subsidi pangan atau bantuan langsung non-tunai, dapat menjaga daya beli kelompok rentan. Pendekatan adaptif ini penting agar kebijakan sosial tidak tertinggal dari perkembangan harga kebutuhan pokok dilapangan.

- Mitigasi Dampak Penambahan SPPG terhadap Inflasi Kabupaten Muara Enim

Potensi lonjakan permintaan pangan perlu diimbangi dengan penguatan pasokan melalui prioritas penyerapan produksi pangan lokal yang melibatkan petani, BUMDes, dan UMKM Pangan. Sinkronisasi perencanaan kebutuhan SPPG dengan TPID menjadi kunci untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan.